

PROSPEK TRANSMIGRASI MELANCARKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Sunarto NDARU MURSITO*

Kini pedesaan menjadi fokus pembangunan nasional, karena disadari di pedesaan menunggu sumber daya manusia dan sumber daya alam *melimpah yang belum tergarap*. Bila sumber daya potensial ini bisa dibangkitkan menggerakkan pembangunan, maka ini akan merupakan potensi besar dalam membangun kesejahteraan bangsa.

Dalam rangka pembangunan tersebut perlu diamati keadaan pedesaan, yang pada umumnya tampak belum bergerak mengolah diri, bahkan seperti masih terjat *sukar beranjak*. Ternyata kemiskinan dan keterbelakangan membelenggu pedesaan, sehingga sukar berkembang memajukan diri. Malahan keadaan pedesaan bisa menjadi semakin parah dengan *meluasnya* pengangguran dan rusaknya lingkungan alam (kemerোসotan sumber daya).

Salah satu jalan *berpotensi besar* untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan pemerოსotan sumber daya alam dan manusia itu ialah transmigrasi. Maka tulisan ini akan mengulas arti transmigrasi untuk melancarkan pembangunan pedesaan dan pembangunan bangsa Indonesia. Pada dasarnya akan dilihat mengapa transmigrasi merupakan alternatif yang bagaimanapun harus ditempuh untuk pembangunan pedesaan dan pembangunan bangsa.

MASALAH KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN DI PEDESAAN

Penduduk pedesaan Indonesia, baik di Jawa maupun di Luar Jawa, pada umumnya masih hidup miskin. Tingkat pendapatan mereka *tidak cukup* untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok yang baku, seperti kebutuhan pangan

*Staf CSIS.

bergizi, sandang dan perumahan yang layak, pendidikan dasar dan perawatan kesehatan. Menurut Biro Pusat Statistik¹ diketahui bahwa pada tahun 1976 terdapat sebesar 71,7% penduduk di pedesaan Jawa dan 76,2% penduduk di pedesaan Luar Jawa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Khususnya untuk penduduk *golongan petani* diketahui bahwa sebesar 80,4% di pedesaan Jawa dan 82,4% di pedesaan Luar Jawa masih hidup di bawah garis kemiskinan.²

Sebab utama dari kemiskinan penduduk pedesaan Indonesia, khususnya golongan petani yang merupakan bagian terbesar penduduk di pedesaan, ialah karena penduduk pada umumnya mendapat nafkah dari *satuan usaha yang kecil-kecil* dan selain itu tingkat pendidikan atau teknologi mereka pun masih rendah sehingga produktivitasnya rendah. Satuan usaha yang kecil-kecil ini tidak efisien dan berada dalam kondisi yang *sukar dimajukan*. Sebenarnya jika produktivitas pedesaan Indonesia khususnya pertanian mudah ditingkatkan, maka peningkatan ini dapat diserap oleh pasaran dalam dan luar negeri.

Impor hasil agraris yang *semakin meningkat* selama dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa negara kita mampu mengkonsumsi peningkatan produksi agraris itu. Biro Pusat Statistik mencatat bahwa impor *bahan pangan* pada tahun 1969 baru US\$ 58 juta, tahun 1971 menjadi US\$ 111 juta, tahun 1973 sudah US\$ 549 juta, dan tahun 1976 meningkat menjadi US\$ 782 juta, akhirnya tahun 1978 mencapai US\$ 1.043 juta. Untuk impor minyak nabati dan hewani (antara lain minyak kelapa) pada tahun 1974 bernilai US\$ 4 juta, tahun 1977 menjadi US\$ 7 juta dan tahun 1978 meningkat menjadi US\$ 68 juta. Ternyata untuk tahun 1978 impor *seluruh barang agraris*, yang sebenarnya bisa dihasilkan pedesaan Indonesia sendiri mencapai harga US\$ 1.143 juta.³

Angkatan kerja di pedesaan Indonesia yang masih agraris mempunyai satuan usaha yang kecil-kecil dan sukar dimajukan antara lain adalah karena penyebaran penduduk yang pincang di daerah-daerah kepulauan Indonesia. Berdasarkan perkiraan sensus penduduk 1971, maka pada tahun 1981 kepadatan penduduk per 1 km² di propinsi DI Yogyakarta adalah 956 orang, Jawa Tengah 776 orang, Jawa Timur 646 orang, Jawa Barat 567 orang dan Bali 494 orang. Sebaliknya kepadatan penduduk per 1 km² di propinsi DI Aceh hanya 50 orang, Sumatera Selatan 45 orang, Bengkulu 33 orang, Riau 23 orang, Kali-

¹Biro Pusat Statistik, *Masalah Pembagian Pendapatan Penduduk Menurut Sosio Profesional di Indonesia 1969/1970-1976*, Lampiran 37.

²Lihat karangan kami pada "Suatu Tinjauan Atas Kemiskinan Struktural di Pedesaan Indonesia" dalam *Analisa*, Maret 1981.

³Biro Pusat Statistik, *Impor 1978 Menurut Jenis Barang dan Negara Asal*, Jakarta, Mei 1979.

mantan Barat 18 orang, Kalimantan Tengah 6 orang, Kalimantan Timur 5 orang, Sulawesi Tenggara 34 orang, Sulawesi Tengah 17 orang, Maluku 19 orang dan Irian Jaya 3 orang. Secara lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1

LUAS DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, % PENDUDUK DESA, KEPADATAN
PENDUDUK DAN BERTAMBAHNYA PER TAHUN DI SELURUH PROPINSI INDONESIA

Propinsi	Luas Daerah dalam Km ²	Jumlah Pen- duduk 1980 (juta)	% Penduduk Desa 1971	Kepadatan Penduduk 1 Km ² Tahun		% Pertam- bahan Penduduk Per Tahun
				1971	1981*	
DI Aceh	55.392	2,61	92	34	50	2,94
Sumatera Utara	70.787	8,36	83	94	126	2,62
Sumatera Barat	49.778	3,40	83	42	76	2,21
Riau	94.562	2,16	87	13	23	3,11
Jambi	44.924	1,44	71	16	30	4,06
Sumatera Selatan	103.688	4,62	73	33	45	3,32
Bengkulu	21.168	0,77	88	25	33	4,44
Lampung	33.307	4,62	90	82	112	5,82
DKI Jakarta	224	6,51	0	7.944	13.471	3,99
Jawa Barat	45.916	27,49	88	440	567	2,70
Jawa Tengah	32.036	25,37	89	634	776	1,66
DI Yogyakarta	3.193	2,75	84	793	956	1,09
Jawa Timur	47.922	29,18	86	539	646	1,50
Bali	5.561	2,47	90	377	494	1,71
Nusa Tenggara Barat	20.177	2,72	92	101	141	2,39
Nusa Tenggara Timur	47.876	2,72	94	47	62	1,91
Timor Timur	-	0,55	-	-	-	-
Kalimantan Barat	146.760	2,48	89	13	18	2,32
Kalimantan Tengah	152.600	0,95	88	4	6	3,46
Kalimantan Selatan	37.660	2,07	73	49	59	2,21
Kalimantan Timur	202.440	1,22	61	4	5	5,80
Sulawesi Utara	19.023	2,09	81	71	118	2,21
Sulawesi Tengah	69.726	1,29	88	10	17	3,46
Sulawesi Tenggara	27.686	0,94	94	22	34	3,14
Sulawesi Selatan	72.761	6,05	82	63	93	1,73
Maluku	74.761	1,41	87	13	19	2,90
Irian Jaya	421.981	1,15	-	2	3	2,68
Indonesia	1.902.016	147,49	83	59	80	2,32

* Perkiraan penduduk akhir tahun berdasarkan Sensus Penduduk 1971.

Sumber: Diolah dari Biro Pusat Statistik, *Peta Pembangunan Sosial Indonesia 1930-1978*, Jakarta, Juli 1978 dan Hasil Sensus Penduduk 1980 dalam *Harian Kompas*, 9 Januari 1981 dan 2 Juli 1981.

Terlalu padatnya penduduk petani di Pulau Jawa telah mengakibatkan usaha tani menjadi kecil-kecil. Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 1976 oleh BPS¹ diketahui, bahwa untuk tahun 1976 di Jawa terdapat sebesar 15,2 juta rumah tangga petani. Di antaranya 3,7 juta rumah tangga (24,34%) me-

¹Sajogyo, "Meningkatkan Martabat Petani Buruh," *Sinar Harapan*, 5 Februari 1980.

miliki tanah garapan lebih dari 0,5 ha. Sedangkan selebihnya 5,7 juta rumah tangga (37,50%) hanya memiliki tanah garapan kurang dari 0,5 ha, dan 5,8 juta rumah tangga (38,16%) adalah rumah tangga tani tak bertanah yang bekerjanya sebagai *buruh tani*. Jika dihitung luas usaha tani minimal 1 ha baru memadai untuk berproduksi secara efisien, maka menurut sensus pertanian ternyata pada tahun 1973 di Jawa terdapat sampai 82,20% usaha tani termasuk tifik efisien.¹

Sebaliknya, penduduk di pedesaan Luar Jawa dan Bali yang amat sedikit di pertanahan yang teramat luas malahan tersebar dalam pemukiman yang *terpencar-pencar*. Penduduk mengumpul di lingkungan pemukiman-pemukiman tertentu yang letak atau jaraknya saling berjauhan, bahkan sampai berjarak puluhan kilometer antara pedesaan yang satu terhadap pedesaan yang lain dan terhadap perkotaan. Jarak yang jauh ini *bisa terdiri dari* hutan lebat, daratan berbukit dan berjurang, lingkungan berawa-rawa atau laut yang luas.

Letak yang berjauhan dan perhubungan yang sukar memang menghambat bahkan mencegah komunikasi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan dengan luar lingkungannya. Maka tak adanya atau kurangnya hubungan sosial ekonomi di pedesaan-pedesaan Luar Jawa-Bali mengakibatkan kurangnya dinamika kultural penduduknya, sehingga prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial di pedesaan-pedesaan ini *sukar berkembang*. Menurut Ditjen Pembangunan Desa² dari 60.415 desa di Indonesia hanyalah 4,5% yang mempunyai prasarana desa cukup baik, 30% mempunyai prasarana cukup dan 65,5% tergolong kurang prasarananya khususnya di pedesaan Luar Jawa-Bali. Kurangnya prasarana desa ini menyebabkan *produktivitas pedesaan sukar ditingkatkan*.

Tiadanya atau sukarnya perhubungan antar desa ke desa, ke kota atau ke luar daerah membuat banyak desa di Luar Jawa-Bali menjadi terpencil-pencil atau terisolasi. Sehubungan dengan ini Ditjen Pembangunan Desa menyatakan, bahwa hanya 21% saja desa di Indonesia berada dalam lingkungan orbitasi kota. Sedangkan 79% desa lainnya jauh dari kota yang merupakan pusat fasilitas, di antaranya kurang lebih 14% sebagai desa yang terisolasi.³

Sebagai penggambaran lebih konkrit bisa diperbandingkan antara *Kabupaten* Klaten di Jawa Tengah yang luas wilayahnya hanya 66 ribu ha tetapi berpenduduk sekitar 1,1 juta orang dan *Propinsi* Sulawesi Tengah yang luas

¹Biro Pusat Statistik, *Sensus Pertanian 1973*, Jilid I, Pebruari 1976.

²Berita *Antara*, 7 Nopember 1977.

³*Ibid.*

wilayahnya 6,97 juta ha tetapi hanya berpenduduk 1,3 juta orang. Kabupaten Klaten mempunyai kepadatan penduduk per 1 km² adalah 1.528 orang, sedangkan Propinsi Sulawesi Tengah adalah 17 orang; yang berarti selisih 1.511 orang setiap km²-nya. Sebagai akibatnya Kabupaten Klaten dan Pulau Jawa pada umumnya menghadapi masalah kepadatan penduduk yang terbentur pada terbatasnya areal tanah pertanian, laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi pangan dan lain-lain. Keadaan sebaliknya terjadi di Propinsi Sulawesi Tengah, karena jarang penduduk maka 30% dari 1.266 desanya adalah pedesaan yang dalam keadaan terisolasi. Bahkan beberapa kecamatan masih sangat terisolasi dari ibukota kabupaten. Akibat isolasi ini, tingkat mobilitas sosial ekonomi dan geografis penduduknya tergolong rendah. Sarana dan prasarana perhubungan atau pemasaran sangat tidak memadai.¹ Keadaan seperti ini pun terjadi di Propinsi Kalimantan Tengah yang kepadatan penduduknya 6 orang/km², Kalimantan Timur 5 orang/km² dan Irian Jaya 3 orang/km².

Sukarnya perhubungan antara desa dengan desa dan kota atau luar daerah membuat masyarakat pedesaan di Luar Jawa-Bali menjadi sukar berkembang. Aspek-aspek kehidupan mereka *menjadi terbatas* dalam lingkungan mereka sendiri. Sebab itu di Luar Jawa-Bali banyak terdapat bermacam-macam suku bersebelahan yang bermasyarakat sendiri-sendiri dan berlainan adat, bahasa atau kebudayaan. Antara satuan pemukiman mereka sukar/tak ada komunikasi sosial dan ekonomi, sehingga dinamika sosial ekonomi di pedesaan mereka sukar berkembang dan taraf hidup mereka pun sukar meningkat.

Penduduk pedesaan ini menjadi statis dalam kehidupan sosial ekonominya serta terikat pada adat dan kebudayaan yang berasal dari tradisi sebelumnya. Padahal dari adat dan kebudayaan ini ternyata banyak yang bertentangan dengan ilmu dan teknologi modern yang dapat meningkatkan kesejahteraan, misalnya kebiasaan kawin muda, tata cara yang bersifat pemborosan, pantangan terhadap jenis pangan yang justru bergizi dan penggunaan cara tani perladangan berpindah-pindah. Departemen Dalam Negeri berkenaan dengan ini mengemukakan bahwa 51% desa di Indonesia tergolong mempunyai tradisi adat yang masih kuat, 42% dalam keadaan transisi dan baru 7% desa adat-istiadatnya tidak mengikat.²

Terutama produktivitas pedesaan Indonesia sukar meningkat adalah karena *rendahnya tingkat pendidikan* angkatan kerja. Dari Sakernas 1976 diketahui bahwa dari angkatan kerja aktif di pedesaan sekitar 95% tingkat pendi-

¹Harian *Kompas*, 3 Desember 1980 dan 9 Januari 1981.

²Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri, *Peranan Pembangunan Masyarakat Desa Dalam Pelita II*, diterbitkan oleh Panitia Wisuda IV Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta 1975.

dikannya adalah SD ke bawah. Mereka ini di antaranya terdiri dari yang tidak pernah mendapat pendidikan sekolah 34% (pada umumnya buta huruf) dan drop out SD 37%. Jadi hanya sekitar 5% angkatan kerja aktif di pedesaan mempunyai tingkat pendidikan SLP ke atas, di antaranya 3,09% tamat SLP dan 1,82% tamat SLA serta 0,12% tamat perguruan tinggi. Dari kenyataan ini bisa diketahui terdapat suatu indikasi, bahwa angkatan kerja di pedesaan *paling siap* adalah bekerja di lapangan pertanian dan masih sulit berpindah ke sektor pekerjaan lain. Sebab kalau dilihat penduduk pedesaan yang *berumur 10 tahun ke atas* pun ternyata sekitar 95% tingkat pendidikannya adalah SD ke bawah. Mereka terdiri dari yang tidak pernah mendapat pendidikan sekolah sama sekali 31%, yang drop out SD 41% dan yang mendapat pendidikan SD sampai tamat 22%. Jadi hanya sekitar 5% penduduk berusia 10 tahun ke atas mempunyai tingkat pendidikan SLP ke atas, yaitu terdiri dari 3,78% tamat SLP dan 1,49% tamat SLA serta 0,09% tamat perguruan tinggi.¹

PENGANGGURAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ALAM

Kenyataan teramat padat dan jarangnyapun penduduk di pedesaan agraris dalam tingkat pendidikan yang masih rendah, membuat keadaan sosial ekonomi di pedesaan Indonesia sukar berkembang. Di satu pihak satuan usaha yang kecil-kecil dan di lain pihak kurangnya prasarana menyebabkan angkatan kerja tidak bisa bekerja sampai produktivitas maksimal. Malahan mereka sangat banyak dalam keadaan *setengah menganggur* sampai *menganggur penuh*. Dari hasil Sakernas 1976 diketahui bahwa hampir separuh *angkatan kerja aktif* di pedesaan Indonesia rata-rata bekerja kurang dari 5 jam sehari, di antaranya hampir sepertiga bekerja kurang dari 3½ jam sehari sampai tak bekerja sama sekali.²

Perhitungan itu didasarkan pada angkatan kerja aktif di pedesaan yang pada tahun 1976 berjumlah 40,4 juta orang. Sebenarnya Sakernas memperhitungkan sebagai angkatan kerja ialah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. Dan mereka ini di pedesaan pada tahun 1976 meliputi jumlah 71,4 juta orang. Dari jumlah itu terdapat 31 juta orang *tidak dimasukkan* angkatan kerja aktif, sebab mereka dianggap tidak memproduksi secara penuh. Namun, jumlah ini sebenarnya merupakan *tenaga kerja potensial*, terdiri dari penduduk yang mengurus rumah tangga (pada umumnya ibu-ibu) ada 17,3 juta, penduduk yang bersekolah 9,1 juta, penduduk yang cacat/pensiun/lain-lain

¹Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia September-Desember 1976*, Jakarta, Mei 1978, hal. 24.

²*Ibid.*, hal. xxiii.

3,9 juta dan pencari kerja 0,7 juta. Mereka ini pun sesungguhnya bisa berproduksi andaikata tersedia lapangan kerja.¹

Dari pengungkapan data itu dapat disimpulkan, betapa besar jumlah *pengangguran tak kentara* di pedesaan baik pada angkatan kerja aktif maupun pada penduduk yang potensial berproduksi. Ditinjau secara nasional maka hal ini sesungguhnya merupakan *pemborosan* sumber daya manusia yang tak terkira besarnya. Selain pengangguran tenaga kerja yang tinggi, di Indonesia *juga terjadi* pengangguran tanah yang tinggi di Luar Jawa, pengangguran potensi tenaga alam seperti sungai, matahari dan laut dan pengangguran bahan mentah. Selama masih ada tenaga kerja sebenarnya tak boleh ada potensi alam atau sumber ekonomi yang dibiarkan menganggur.

Terdesak oleh keadaan kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja, ternyata penduduk yang semakin terlalu padat di pedesaan Jawa terus-menerus menyebabkan *kemerostan lingkungan alamnya*. Karena kekurangan tanah garapan, penduduk telah membabat hutan sampai ke lereng-lereng pegunungan untuk membuat peladangan dan mengambil kayunya untuk berbagai keperluan. Selain itu, karena sebagian terbesar penduduk desa maupun kota menggunakan kayu untuk bahan bakar dan bahan perumahannya, penduduk pedesaan pada umumnya juga menebangi kayu-kayuan di sekeliling mereka untuk keperluan sendiri atau dijual sebagai sumber penghasilannya.

Akibatnya terjadilah penggundulan hutan dan kayu-kayuan di pedesaan Jawa, yang *merusak tata hidrologi* tanah Jawa. Derasnya air hujan di musim penghujan yang tidak ditahan hutan dan pohon-pohonan, terus-menerus menggerogoti dan menghanyutkan tanah subur menyebabkan tandusnya pertanahan dan memerosotkan sumber-sumber mata air di perwilayahannya. Kerusakan alam lingkungan demikian ini sudah mencapai *keadaan yang parah*. Ini ditandai dengan terjadinya banjir-banjir pada setiap musim hujan yang melanda hampir di seluruh aliran sungai di Jawa, dan di sana-sini mendatangkan malapetaka banjir besar. Sebaliknya, di musim kemarau sangat luas areal persawahan kekurangan air irigasi, karena debit air sungai sangat merosot.

Sedangkan di pedesaan Luar Jawa dan Bali yang terisolasi dan terhambat dari dinamika perkembangan kultural, pengetahuan dan teknologi pertanian penduduk pada umumnya masih sangat rendah. Mereka banyak masih menggunakan cara tani peladangan berpindah-pindah, yang berakibat menggunduli hutan. Disebabkan pula oleh pengusaha hutan tak bertanggung jawab dari perusahaan-perusahaan modern, di pedesaan Luar Jawa sekarang juga sudah

¹*Ibid.*, hal. 6.

merajalela kemerosotan lingkungan alam, berupa gundulnya perhutanan menjadi padang alang-alang atau semak belukar dan padang tandus. Untuk saat ini daerah seperti Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Selatan sudah mencapai keadaan rawan akibat rusaknya kawasan hutan. Sebab itu ketika musim hujan di daerah itu sudah terjadi bencana-bencana banjir yang merusakkan pemukiman dan lapangan pencaharian penduduk, bahkan sampai membobolkan jembatan-jembatan atau memutuskan jalan perhubungan.

Tabel 2

DAFTAR KABUPATEN DAN KECAMATAN RAWAN DI INDONESIA

Propinsi	Jumlah Kabupaten			Jumlah Kecamatan		
	Total	Rawan	%	Total	Rawan	%
DI Aceh	10	6	60	113	54	40,6
Sumatera Utara	17	11	64,7	190	79	41,5
Sumatera Barat	14	8	57,1	85	37	43,5
Riau	6	5	83,3	70	20	28,5
Jambi	6	4	66,7	37	9	24
Sumatera Selatan	10	7	70	86	27	31
Bengkulu	4	1	25	21	3	14
Lampung	4	3	75	70	57	84,4
DKI Jakarta	5	-	-	30	-	-
Jawa Barat	24	18	75	425	221	52
Jawa Tengah	35	29	82,8	494	392	79,4
DI Yogyakarta	5	4	57,1	118	27	22,9
Jawa Timur	37	29	78,4	681	373	54,4
Kalimantan Barat	7	4	57,1	118	27	22,9
Kalimantan Tengah	6	4	83,3	82	25	30,5
Kalimantan Selatan	10	9	90	100	63	63
Kalimantan Timur	6	4	66,7	72	20	27,8
Sulawesi Utara	6	3	50	83	20	24,1
Sulawesi Tengah	4	4	100	65	11	16,9
Sulawesi Selatan	23	12	52	169	78	46
Sulawesi Tenggara	4	4	100	44	19	43
Bali dan Nusa Tenggara	26	25	96,2	251	68	27,1
Maluku	4	4	100	52	35	67
Irian Jaya dan Timor Timur	22	-	-	177	-	-
Indonesia	282	199	75,2	3.609	1.716	42,5

Sumber: Direktorat Tataguna Tanah, Departemen Dalam Negeri.

Kerusakan lingkungan alam hutan dan pepohonan ini di seluruh Indonesia dapat dikatakan *terus semakin gawat*, sebab sudah mencapai areal 40 juta hektar dari luas daratan negara kita yang 190 juta hektar.¹ Menurut Ditjen Kehutanan areal tanah rusak yang diakibatkan perladangan berpindah saja setiap tahunnya bertambah sekitar 400.000 hektar. Kerusakan lebih seperlima dari tanah air kita ini diperkirakan semakin bertambah meluas 1-2% setahunnya, bila tidak segera ditanggulangi. Kerusakan alam lingkungan yang disebabkan kemiskinan dan keterbelakangan telah membuat *amat banyak daerah menjadi rawan*, dan masyarakatnya terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan. Jumlah daerah rawan ini ternyata pada tahun 1976 mencapai 42,5% dari total kecamatan yang ada di seluruh Indonesia (lihat Tabel 2), dan ini tentu akan sangat ironis jika tidak diperhitungkan oleh pekikan pembangunan yang sedang berjalan di bumi pertiwi tercinta ini.

TRANSMIGRASI UNTUK MEMBANGUN DESA ASAL DAN DESA TUJUAN

Sukar atau macetnya pembangunan di kebanyakan desa Indonesia, yang masih miskin serta terbelakang dan bahkan keadaannya bisa semakin parah karena meluasnya kemerosotan sumber daya, *bisa diterabas* dengan proyek transmigrasi. Sebab sumber kemiskinan dan keterbelakangan yaitu kekurangan dalam *satuan usaha kerja* dan kekurangan *prasarana desa* dapat diatasi dengan pemindahan penduduk dari pedesaan Jawa-Bali ke pedesaan daerah-daerah lain. Ternyata transmigrasi yang diprogramkan Pemerintah, kini menunjukkan hasil yang semakin menggembirakan. Kalau selama Pelita I berhasil ditransmigrasikan 46.000 KK, maka dalam Pelita II meningkat dapat ditransmigrasikan 75.000 KK. Sedangkan pada Pelita III selama dua tahun saja sudah ditransmigrasikan 63.000 KK,² dan enam bulan pertama tahun 1981 berhasil ditransmigrasikan 52.583 KK.³

Pembangunan pedesaan di Jawa-Bali bisa dilakukan *lebih lancar*, kalau dapat dikurangi penduduknya yang teramat padat sehingga melampaui daya dukung lingkungan alamnya dan melampaui perolehan yang cukup dalam hal sumber daya alam. Penduduk ini ditransmigrasikan ke daerah Luar Jawa-Bali yang langka penduduk, *untuk menggiatkan* pembangunan di pedesaan-pedesaannya yang kekurangan bermacam-macam prasarana karena terpecah-pecah dan terpencil-pencilnya. Proyek transmigrasi pada dasarnya dapat membuat di daerah-daerah ini bisa terjadi *dinamika sosial, ekonomi dan budaya ke arah kemajuan dan persatuan nasional*.

¹Berita Antara, 12 Januari 1981.

²Harian The Indonesian Times, 28 Januari 1981.

³Harian Kompas, 11 Agustus 1981.

Sebagian besar penduduk pedesaan ketrampilannya paling siap adalah bekerja di lapangan agraris. Maka penataan angkatan kerja agraris mudah ditempuh untuk membangun pedesaan, khususnya karena sampai kini negara kita semakin meningkat kekurangannya akan hasil-hasil agraris. Kebutuhan hasil agraris yang semakin besar karena penambahan penduduk menjelang abad ke-21, jelas *tak akan terpenuhi* dengan membebaskan tugas pada pertanian di Jawa-Bali yang sudah kekurangan tanah garapan. Sebab itu transmigrasi perlu mengembangkan potensi pertanian di pedesaan Luar Jawa-Bali, untuk membangun pertanian Indonesia yang semakin kuat sampai menjadi *negara pertanian yang tangguh dan semada*, bahkan merealisasikan potensinya menjadi negara agro-power dari kawasan tropis. Bila terjadi pembangunan pertanian secara besar, ini pun mempunyai masa depan yang cerah mengingat kebutuhan hasil-hasil agraris di pasaran dunia, khususnya bahan pangan, *akan semakin meningkat*. Sebab sangat banyak negara dalam hal potensi agrarisnya kecil dibanding jumlah penduduk yang terus meningkat.

Dengan transmigrasi, petani dari Jawa-Bali dapat meneladankan caranya bertani yang lebih maju kepada penduduk setempat yang bahkan masih banyak menggunakan cara tani berpindah-pindah yang menggunduli hutan. Selain itu transmigrasi dapat memanfaatkan atau 'menghijaukan' (dengan perkebunan) tanah rusak, padang alang-alang dan semak belukar di Luar Jawa dan Nusa Tenggara yang luasnya sampai berpuluh-puluh juta hektar itu. Dengan ini tidak perlu membabat hutan-hutan primer, sehingga menghemat waktu serta biaya dan terutama bisa melestarikan hutan primer yang menyimpan banyak hayat yang belum diketahui manfaatnya. Khususnya transmigrasi *memudahkan pembangunan* desa asal transmigran, yaitu pertanahan sempit-sempit yang ditinggalkannya dapat digabung-gabungkan menjadi satuan yang lebih besar sehingga memungkinkan lebih efektifnya penggarapan. Lingkungan alam rusak yang ditinggalkannya memungkinkan dibenahi dengan penghijauan tanaman yang memberi pendapatan banyak. Dengan demikian transmigrasi dapat dikaitkan dengan penyelamatan tanah air kita di desa tujuan dan desa asal transmigran dari *kerusakan alam yang berlarut-larut*.

Transmigrasi juga memudahkan pengembangan prasarana desa di Luar Jawa-Bali dan mengefektifkan pemanfaatan prasarana daerahnya. Sebagai perbandingan, Propinsi Sumatera Selatan berpenduduk 5 juta orang dan Jawa Timur berpenduduk 29 juta orang. Kedua daerah ini mempunyai prasarana daerah yang kurang lebih jumlahnya sama, tetapi jumlah rakyat yang dapat memanfaatkannya jauh berbeda seperti jalur jalan kereta api, jalan raya negara, lapangan terbang, pelabuhan, pusat penyiaran radio dan televisi. Maka ditinjau secara nasional mentransmigrasikan penduduk Jawa Timur ke Sumatera Selatan berarti *mengefisienkan pengembangan dan pemanfaatan* prasarana desa/daerah di Sumatera Selatan.

Sesungguhnya proyek transmigrasi secara hakiki sangat mendukung pelaksanaan program 8 jalur pemerataan pembangunan bisa diproses untuk *pedesaan daerah tujuan maupun daerah asal* transmigrasi. Sebab transmigrasi dapat membuka lapangan kerja (jalur ke-4) kepada penduduk yang miskin khususnya dan menyebarkan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air (jalur ke-7). Bila penduduk dimungkinkan bekerja semaksimal produktivitasnya, maka pendapatannya bisa ditingkatkan (jalur ke-3) untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya: pangan, sandang, perumahan dan kelancaran perhubungan (jalur ke-1), pendidikan dan kesehatan (jalur ke-2), serta kesempatan memperoleh keadilan (jalur ke-8). Lalu karena dengan transmigrasi tersedia kesempatan kerja yang luas, maka kaum wanita dan generasi muda atau tenaga kerja potensial yang berjumlah 31 juta orang itu dimungkinkan berpartisipasi membangun desa dan tanah airnya (jalur ke-6).

Kalau pendapatan rakyat meningkat karena bisa bekerja semaksimal produktivitasnya, maka *daya belinya akan naik*. Daya beli rakyat yang semakin membaik ini merupakan kondisi untuk berkembangnya lapangan usaha industri, jasa-jasa dan perdagangan (jalur ke-5). Terlebih lagi sebelum daya beli rakyat secara umum meningkat, tentulah cita-cita untuk mengembangkan industrialisasi dan modernisasi nasional sukar dilaksanakan, juga harapan untuk mencerdaskan serta memajukan peradaban penduduk *tak bisa dibiayai oleh pendapatannya sendiri*.

Bisa dikatakan proyek transmigrasi sebenarnya merupakan suatu kunci untuk menyukseskan pembangunan pedesaan dan pembangunan bangsa. Sebab berhasilnya transmigrasi akan membuka peluang yang *lebih berkepastian* untuk memecahkan masalah pangan dan lapangan kerja yang makin lama akan semakin menyita perhatian nasional, selain itu mutlak perlu untuk memecahkan masalah kependudukan dan mendukung *pengisian Wawasan Nusantara*: membina persatuan/kesatuan bangsa serta mewujudkan atau mengembangkan kebudayaan nasional yang saling memperkaya unsur-unsurnya.

Dalam hal ini dapat digarisbawahi pandangan seorang anggota DPR putera daerah Kalimantan Barat, J.C. Oevang Oeray yang pernah pula menjabat Gubernur Kalimantan Barat, yang menyatakan bahwa keadilan sosial sulit dicapai tanpa memprioritaskan pemerataan jumlah penduduk (transmigrasi) di setiap pulau di seluruh Indonesia.¹

PENUTUP

Adapun proyek nasional transmigrasi selama ini mencakup transmigrasi pemerintah dan transmigrasi spontan. Ternyata transmigrasi yang dirintis oleh

¹Harian *Suara Karya*, 12 Januari 1981.

pemerintah sampai kini *dapat menyerap arus* transmigrasi spontan *dalam jumlah perpindahan penduduk yang jauh lebih besar*. Menurut penelitian Biro Pusat Statistik dan Ditjen Transmigrasi misalnya antara tahun 1966-1970 dari sebanyak 422.000 orang penduduk yang berpindah hanya 12% adalah transmigran yang ditanggung pemerintah dan 88% adalah transmigran spontan. Sedangkan antara tahun 1971-1975 perbandingan menjadi 29% transmigran pemerintah dan 71% transmigran spontan.¹

Sungguh *sangat beruntung* bangsa kita mempunyai cara transmigrasi untuk menerabas lingkaran setan kemiskinan, yang pada umumnya *tidak dimiliki* oleh bangsa lain! Maka sudah selayaknya kemungkinan anugerah Tuhan ini kita manfaatkan *sebesar mungkin*, untuk mendorong lancarnya gerak pembangunan di pedesaan yang miskin dan tak maju-maju karena kelebihan atau kelangkaan penduduk.

Berdasarkan perhitungan biaya transmigrasi pemerintah sebesar US\$ 5.000 (Rp 3,325 juta) per 1 kepala keluarga,² maka devisa impor barang agraris negara kita seharga US\$ 1.143 juta dalam setahun itu sebenarnya dapat untuk mentransmigrasikan 228.600 keluarga petani bertanah sempit atau tak bertanah. Selanjutnya dari transmigrasi pemerintah ini tentu bisa menyerap transmigrasi spontan dalam jumlah pemindahan penduduk yang jauh lebih besar lagi.

¹Mingguan *Tempo*, 24 Januari 1981.

²Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Prof. Harun Zain dalam harian *Berita Buana*, 30 Januari 1981.